

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 7337K/PID.SUS/2024 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI
PENJUALAN ASET DI DESA BERAKIT KABUPATEN BINTAN**

Oleh

**Widya Ramadani
NIM. 190574201044**

ABSTRAK

Pemerintah telah mengatur secara tegas mengenai pengelolaan keuangan dan aset desa melalui berbagai peraturan perundang-undangan, praktik penyimpangan dalam pengelolaannya masih kerap terjadi. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa aset desa merupakan kekayaan desa yang harus dikelola secara tertib, transparan, serta bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat desa. Salah satu perkara tindak pidana korupsi yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 7337 K/Pid.Sus/2024 yang berkaitan dengan penjualan aset Desa Berakit, Kabupaten Bintan. Dalam perkara tersebut, Terdakwa selaku Kepala Desa terbukti melakukan pengalihan atau penjualan tanah desa yang merupakan bagian dari aset desa dan termasuk dalam ruang lingkup keuangan negara kepada pihak swasta tanpa melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penalaran hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Tpg Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 7337 K/Pid.Sus/2024 sehingga menimbulkan perbedaan dalam penjatuhan pidana terhadap perkara tindak pidana korupsi penjualan aset desa di Desa Berakit Kabupaten Bintan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif juga dapat dipahami sebagai suatu pendekatan yang menggunakan prinsip-prinsip, kaidah-kaidah, dan asas-asas hukum dalam menelaah substansi peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan amar putusan bersumber dari perbedaan penilaian pada unsur kerugian keuangan negara, di mana Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Tpg meniadakan kerugian negara berdasarkan batalnya akta perdata, sedangkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 7337 K/Pid.Sus/2024 tetap membuktikannya berdasarkan penalaran hukum yang lebih komprehensif dan independen dari hukum perdata. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa inkonsistensi ratio decidendi kedua putusan bersumber dari perbedaan cara memaknai hubungan antara keabsahan hukum perdata dan unsur kerugian keuangan negara, bukan dari perbedaan penilaian fakta persidangan.

Kata Kunci: Aset Desa, Korupsi, Penalaran Hukum

**A JURIDICAL ANALYSIS IN SUPREME COURT DECISION NUMBER
7337K/PID.SUS/2024 REGARDING THE CORRUPTION OFFENSE OF
ASSET SALES IN BERAKIT VILLAGE, BINTAN REGENCY**

By
Widya Ramadani
NIM. 190574201044

ABSTRACT

Although the government has strictly regulated village financial and asset management through various laws and regulations, irregularities in their management frequently occur. Law Number 6 of 2014 concerning Villages affirms that village assets constitute village wealth that must be managed in an orderly, transparent, and accountable manner for the greatest benefit of the village community. One corruption case worthy of analysis is Supreme Court Decision Number 7337 K/Pid.Sus/2024, which concerns the sale of assets belonging to Berakit Village, Bintan Regency. In this case, the defendant—acting as the Village Head—was proven to have transferred or sold village land (which constituted a village asset and fell within the scope of state finances) to a private party without adhering to the mechanisms prescribed by law. This study aims to analyze the judges' reasoning in Tanjungpinang District Court Decision Number 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tpg and Supreme Court Decision Number 7337 K/Pid.Sus/2024, specifically regarding the differing criminal sentences imposed in the corruption case involving the sale of Berakit Village assets. The study employs a normative-juridical approach—an approach that utilizes legal principles, norms, and doctrines to examine the substance of legislation. The research findings indicate that the discrepancy in the court rulings stems from differing assessments regarding the element of state financial loss; specifically, the Tanjungpinang District Court Decision Number 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN... One ruling negated the existence of state financial loss based on the invalidation of a civil deed, whereas Supreme Court Judgment Number 7337 K/Pid.Sus/2024 affirmed its existence based on legal reasoning that was more comprehensive and independent of civil law. This study concludes that the inconsistency in the **ratio decidendi** between the two judgments stems from differing interpretations of the relationship between civil law validity and the element of state financial loss, rather than from differences in the assessment of trial facts.

Keywords: Village assets, corruption, Legal reasoning.